

ABSTRAK

Dinda Febriani, 1228010056, 2026, Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bandung yang telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti surat pelanggaran ETLE. Data menunjukkan bahwa dari puluhan ribu surat tilang yang dikirimkan, hanya sebagian kecil yang dikonfirmasi oleh pelanggar. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur teknologi dengan hasil implementasi kebijakan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai kerangka analisis yang mencakup enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap atau disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan purposive sampling, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data sesuai dengan Sugiyono (2022) meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandung telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas untuk mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan meminimalkan pungutan liar. Sumber daya manusia dan dukungan anggaran relatif memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan, serta karakteristik agen pelaksana menunjukkan profesionalisme dan responsivitas yang baik. Komunikasi antar organisasi juga berjalan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait, dan sikap pelaksana menunjukkan dukungan positif terhadap kebijakan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek komunikasi kepada masyarakat yang belum merata, keterbatasan pada sumber daya teknologi, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menindaklanjuti pelanggaran yang tercermin dari rendahnya tingkat konfirmasi ETLE. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi publik secara lebih masif dan berkelanjutan, peningkatan pengelolaan infrastruktur teknologi, serta upaya peningkatan kepatuhan masyarakat guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ETLE.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Penegakan Hukum Lalu Lintas, Kota Bandung